

Kinerja Operasional Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Lappa Kabupaten Sinjai

Operational Performance of Fish Landing Base (PPI) Lappa Sinjai Regency

Zalzah Rahmadani, Muhammad Kurnia✉, Achmar Mallawa

Departemen Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin
Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10 Tamalanrea Indah, Makassar 90245

✉corresponding author: kurniamuhammad@fisheries.unhas.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kinerja operasional pelabuhan perikanan PPI Lappa Kabupaten Sinjai. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dengan aspek yang diteliti meliputi penyediaan fasilitas yang digunakan dalam aktivitas operasional PPI Lappa. Data dianalisis secara deskriptif menggunakan metode skoring dan tabel penilaian kinerja operasional. Penilaian kinerja diperoleh dengan membandingkan kondisi PPI Lappa saat ini dengan ketentuan dalam Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan No.PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan dan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap No.432/DPT/OT.220.D3/I/2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa capaian kinerja PPI Lappa yaitu sebesar 63,6% atau status kinerja baik. Setiap parameter memiliki persentase keberhasilan bobot dan nilai tinggi, meliputi jumlah produksi 960,05%, frekuensi kunjungan kapal 73,3%, pelayanan es 458,10 %, pelayanan BBM 175,40% pelayanan air bersih 22,05% dan tersedianya fasilitas pelabuhan seperti kantor administrasi, pemasaran nasional, sarana pemasaran, kantin, dan tempat ibadah. Adapun fasilitas yang tersedia tapi tidak berfungsi adalah pos jaga. Fasilitas yang tidak tersedia seperti fasilitas industri pengolahan, fasilitas perbaikan kapal, fasilitas suplai suku cadang, mess, dan poliklinik.

Kata kunci: kinerja operasional, pelabuhan, PPI Lappa

Abstract

This study aims to analyze the level of operational performance the fishing port clas PPI Lappa of Sinjai Regency. The research method used in a case study with the aspects studied include the provision of facilities used in PPI Lappa operational activities. Data were analyzed descriptively using the scoring method and operational performance appraisal table. The performance assessment is obtained by comparing the current condition of PPI Lappa with the provisions in the regulations stipulated of The Ministry of Maritime Affairs and Fisheries No. PER.08/MEN/2012 concerning fishing ports and the decision of the Director General of Capture Fisheries No.432/DPT3/OT.220.D3/I/2008 regarding guidelines for evaluating the performance of fishing port technical implementing units. The results of the study show that the performance of coconut PPI Lappa is 63,6 % or good performance status. Each parameter has a high percentage of weight and value success, includes the number of production 960,05%, ship visting frequensy 73,3%, ice service 458,10 %, fuel service ships 175,40%, clean water service 22,05% and the availability of port facilities such as administration office, national marketing, marketing facilities, canteen, and mosque. The facilities available but not functioning are the guard post. Facilities that are not available, such as industrial facilities, processing facilities, ship repair facilities, supply facilities for engine parts and polyclinics.

Keywords: operational performance,port, PPI Lappa

Pendahuluan

Kabupaten Sinjai memiliki potensi perikanan yang besar dan didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), sehingga sangat memungkinkan bagi pengembangan usaha di sektor kelautan dan perikanan. Hal ini

memberikan dukungan yang besar dalam upaya mewujudkan Kabupaten Sinjai sebagai pemasok ikan terbesar di Sulawesi Selatan. Kabupaten Sinjai merupakan salah satu daerah dari Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki daerah yang dijadikan salah satu pelabuhan yang cukup besar sebagai bongkar muat hasil-hasil perikanan (Kahar, 2013). Menurut Sulfitra dan Ariyanto (2018), fungsi pelabuhan perikanan akan terlaksana dengan baik apabila dilengkapi dengan fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang.

PPI Lappa ditetapkan sebagai pelabuhan perikanan dengan klarifikasi pelabuhan perikanan Tipe D, yaitu hanya mampu melayani kapal perikanan yang ukurannya dibawah atau sama dengan 5 GT dan mampu menampung sekurang-kurangnya 15 unit kapal atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 75 GT sekaligus melayani kapal ikan yang beroperasi di perairan pedalaman dan perairan kepulauan serta pemasaran hasil perikanan rata-rata 2 ton/hari, sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan 2012.

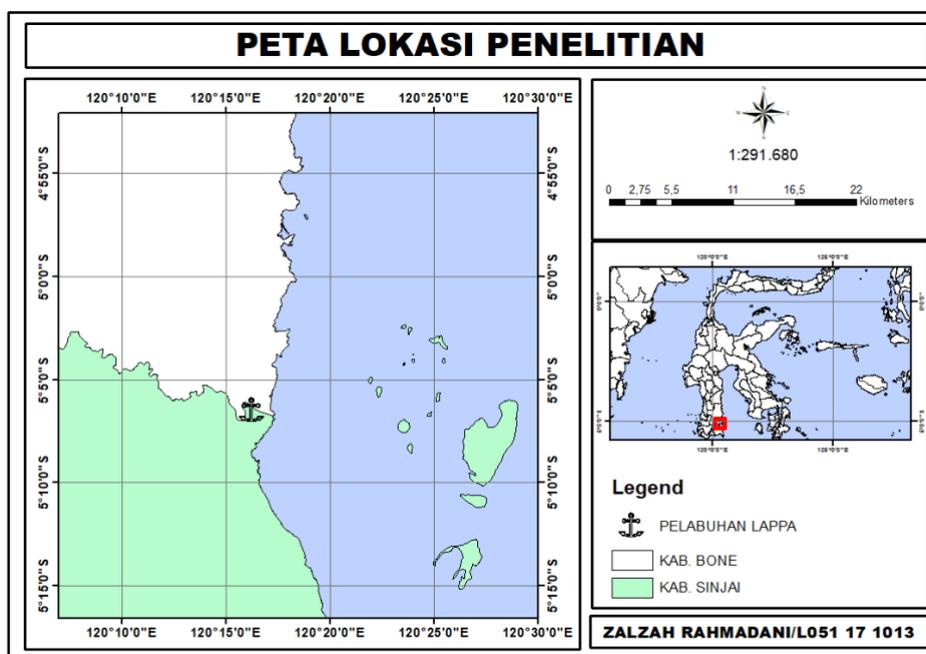
Banyaknya aktivitas perikanan tangkap di PPI Lappa tidak terlepas dari permasalahan. Wibowo *et al.* (2021), menjelaskan bahwa fasilitas PPI Lappa belum memenuhi standar dilihat dari kelengkapan fasilitas. Fasilitas pokok PPI Lappa belum memiliki penahan gelombang (*breakwater*), bangunan pantai turap dan groin, serta alur pelayaran. Permasalahan yang kerap kali terjadi yaitu kesesuaian dermaga dan tempat pelelangan ikan yang belum memadai aktivitas di dermaga sangat besar dan padat yang tidak sebanding dengan jumlah kapal perikanan yang melakukan bongkar muat hasil tangkapan dan tempat pelelangan ikan yang tidak dimanfaatkan dengan baik oleh para nelayan dan pedagang ikan. Sebagian TPI hanya digunakan sebagai lahan parkir oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan kebanyakan penjual ikan tidak melakukan transaksi jual beli di dalam gedung TPI. Permasalahan selanjutnya tidak tersedia fasilitas seperti pabrik es, mess, perbaikan alat tangkap, perbaikan kapal, suplai suku cadang, industri pengolahan dan perlu perbaikan untuk beberapa fasilitas yang rusak seperti wc umum dan pos jaga.

Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu dilakukan penelitian untuk menganalisis seberapa besar tingkat kinerja operasional Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Lappa Kabupaten Sinjai sekaligus mengevaluasi kemungkinan terjadi tingkatan kelas. pelabuhan perikanan yang dapat menunjang kegiatan nelayan Kabupaten Sinjai.

Bahan dan Metode

Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret – Mei 2021 di PPI Lappa Kabupaten Sinjai. Lokasi penelitian dapat dilihat pada (Gambar 1).



Gambar 1. Peta lokasi penelitian di PPI Lappa

Metode Penelitian

Penelitian dilaksanakan dengan metode studi kasus PPI Lappa, dengan cara pengamatan dan pengukuran fasilitas, wawancara, dan studi pustaka. Aspek yang diteliti meliputi fasilitas operasional pelabuhan sebagai parameter analisis kinerja operasional untuk mengetahui kapasitas dan kinerja operasional PPI Lappa. Analisis selanjutnya hasil penilaian kinerja dibandingkan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 Tentang Kepelabuhanan dan Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 432/DPT/3/OT.220.D3/I/2008 Tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Unit Pelaksanaan Teknis Pelabuhan Perikanan.

Analisis Data

Analisis data yang digunakan untuk mengetahui kinerja operasional PPI Lappa digunakan metode skoring, asumsi yang digunakan adalah semua parameter yang mempunyai tingkat kepentingan yang berbeda. Semakin tinggi jumlah skor parameter maka akan semakin baik. Tahap-tahap analisis kinerja operasional pelabuhan perikanan sebagai berikut:

Penentuan parameter pengukuran kinerja pelabuhan perikanan

Penentuan parameter pengukuran kinerja dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Parameter pengukuran kinerja operasional pelabuhan perikanan

No.	Parameter	Tujuan
1	Produksi	Jumlah produksi ikan (ton) / hari
2	Frekuensi Kunjungan kapal / hari (unit)	Jumlah kunjungan kapal (unit)/hari
3	Pelayanan Es	Jumlah penggunaan es / hari
4	Pelayanan BBM	Jumlah penggunaan BBM / hari
5	Pelayanan Air Bersih	Jumlah penggunaan air bersih / hari
6	Kantor Administrasi	Keberadaan kantor administrasi
7	pemasaran	Internasional,nasional atau local
8	Industri pengolahan	Keberadaan industri pengolahan
9	Fasilitas perbaikan alat tangkap	Keberadaan fasilitas perbaikan alat tangkap
10	Fasilitas perbaikan kapal	Keberadaan fasilitas perbaikan kapal
11	Fasilitas suplai suku cadang	Keberadaan fasilitas suplai suku cadang
12	Sarana pemasaran	Keberadaan sarana pemasaran (TPI)
13	Mess	Keberadaan akomodasi seperti mess
14	Kantin	Keberadaan kantin
15	Tempat ibadah	Keberadaan fasilitas peribadatan
16	poliklinik	Keberadaan poliklinik
17	Pos jaga	Keberadaan pos jaga

Penentuan bobot parameter

Setiap parameter yang telah ditentukan dalam mengukur kinerja operasional pelabuhan perikanan perlu diberikan bobot masing-masing karena tingkat kepentingan setiap parameter yang ada berbeda-beda. Penentuan proporsi bobot parameter diurutkan berdasarkan nilai kepentingan diantara parameter tersebut. Penentuan bobot parameter, dapat dilihat pada Tabel 2

Tabel 2. Bobot Parameter Kinerja Pelabuhan Perikanan (Mallawa dalam Jaya, 2019)

No.	Parameter	Bobot Parameter
1	Produksi	1,0
2	Frekuensi Kunjungan kapal / hari (unit)	1,0
3	Pelayanan Es	1,0
4	Pelayanan BBM	1,0
5	Pelayanan Air Bersih	1,0
6	Kantor Administrasi	0,5
7	Pemasaran	0,6
8	Industri pengolahan	0,6
9	Fasilitas perbaikan alat tangkap	0,5
10	Fasilitas perbaikan kapal	0,5
11	Fasilitas suplai suku cadang	0,4

12	Sarana pemasaran	0,4
13	Mess	0,3
14	Kantin	0,3
15	Tempat ibadah	0,3
16	Poliklinik	0,3
17	Pos jaga	0,3

Penentuan nilai keberhasilan dan nilai parameter

Penilaian terhadap kinerja operasional pelabuhan ditentukan oleh nilai keberhasilan atau skor keberhasilan. Penilaian keberhasilan didasarkan pada nilai indikator yang telah ditetapkan. Nilai indikator setiap parameter berbeda-beda untuk masing-masing tipe pelabuhan, digunakan indikator pelabuhan perikanan tipe D atau Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Perhitungan nilai keberhasilan dan nilai parameter dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Cara perhitungan nilai keberhasilan dan nilai parameter (Mallawa dalam Jaya, 2019)

No.	Parameter	Tujuan	Nilai Keberhasilan	Nilai Parameter
1	Produksi	Jumlah produksi ikan (ton)/hari	≥ 2 ton	5
			$< 2 - 1$ ton	3
			< 1 ton	1
2	Frekuensi kunjungan kapal per hari (unit)	Jumlah kunjungan kapal (unit)/hari	≥ 15 unit	5
			$< 15 - 7$ unit	3
			< 7 unit	1
3	Pelayanan es	Jumlah penggunaan es/hari	≥ 4 ton	5
			$< 4 - 2$ ton	3
			< 2 ton	1
4	Pelayanan BBM	Jumlah penggunaan BBM / hari	≥ 3 ton	5
			$< 3 - 1,5$ ton	3
			$< 1,5$ ton	1
5	Pelayanan air bersih	Jumlah penggunaan air bersih / hari	≥ 30 ton	5
			$< 30 - 15$ ton	3
			< 15 ton	1
6	Kantor Administrasi	Keberadaan kantor administrasi	Tersedia berfungsi	5
			Tersedia tidak berfungsi	3
			Tidak tersedia	1
7	Pemasaran	Internasional, nasional atau lokal	Internasional	5
			Nasional	3
			Lokal	1
8	Industri Pengolahan	Keberadaan industri pengolahan	Tersedia berfungsi	5
			Tersedia tidak berfungsi	3
			Tidak tersedia	1
9	Fasilitas perbaikan alat tangkap	Keberadaan fasilitas perbaikan alat tangkap	Tersedia berfungsi	5
			Tersedia tidak berfungsi	3
			Tidak tersedia	1
10	Fasilitas perbaikan kapal	Keberadaan fasilitas perbaikan kapal	Tersedia berfungsi	5
			Tersedia tidak berfungsi	3
			Tidak tersedia	1
11	Fasilitas suplai suku cadang	Keberadaan fasilitas suplai suku cadang	Tersedia berfungsi	5
			Tersedia tidak berfungsi	3
			Tidak tersedia	1

12	Sarana pemasaran	Keberadaan sarana pemasaran	Tersedia berfungsi	5
			Tersedia tidak berfungsi	3
			Tidak tersedia	1
13	Mess	Keberadaan akomodasi seperti mess	Tersedia berfungsi	5
			Tersedia tidak berfungsi	3
			Tidak tersedia	1
14	Kantin	Keberadaan kantin	Tersedia berfungsi	5
			Tersedia tidak berfungsi	3
			Tidak tersedia	1
15	Tempat ibadah	Keberadaan tempat peribadahan	Tersedia berfungsi	5
			Tersedia tidak berfungsi	3
			Tidak tersedia	1
16	Poliklinik	Keberadaan fasilitas poliklinik	Tersedia berfungsi	5
			Tersedia tidak berfungsi	3
			Tidak tersedia	1
17	Pos Jaga	Keberadaan pos jaga	Tersedia berfungsi	5
			Tersedia tidak berfungsi	3
			Tidak tersedia	1

Setiap pemberian nilai pada masing-masing parameter bertujuan mengetahui tingkat kinerja Pangkalan Pendaratan Ikan Lappa berdasarkan parameter yang telah ditentukan.

Penentuan Nilai Perolehan

Setelah diperoleh nilai keberhasilan dan nilai parameter, selanjutnya menentukan nilai perolehan berdasarkan perkalian antara bobot parameter dengan nilai parameter. Setelah nilai perolehan diketahui selanjutnya mencari nilai riil yang merupakan total nilai perolehan yang merupakan nilai yang menjadi penentu penilaian kinerja PPI Lappa. Cara mendapatkan total nilai perolehan yaitu dengan cara menjumlahkan nilai-nilai perolehan pada masing-masing parameter.

Penentuan Penilaian Kinerja Pelabuhan

Penentuan penilaian kinerja menggunakan rumus (Mallawa dalam Jaya, 2019):

$$\text{Nilai Kinerja PPI} = \frac{\text{Total Nilai Perolehan}}{\text{Nilai Perolehan Maksimum}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui kinerja dari PPI Lappa maka perlu diketahui penilaian-penilaian kinerja, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Penilaian Kinerja Pelabuhan Perikanan (Mallawa dalam Jaya, 2019)

Persentase Kinerja	Penilaian
≥ 80% - 100%	Kinerja pelabuhan perikanan sangat baik
≥ 50% - < 80%	Kinerja pelabuhan perikanan baik
< 50%	Kinerja pelabuhan perikanan kurang baik

Hasil dan Pembahasan

Hasil pengamatan dan analisis terhadap beberapa parameter yang digunakan dalam menilai kinerja PPI Lappa menunjukkan bahwa produksi ikan 19.201 ton setiap hari dari 11 unit kapal yang melakukan bongkar muat. Sementara PPI Lappa mampu memberikan pelayanan es 18.324 ton/hari dan air bersih 6.616 ton/hari. Selain itu ada beberapa fasilitas yang tidak tersedia seperti fasilitas industri pengolahan, fasilitas perbaikan alat tangkap dan kapal, fasilitas suplai suku cadang, mess, dan poliklinik. Akan tetapi ada juga fasilitas pelabuhan yang tersedia namun tidak berfungsi yakni pos jaga. Selanjutnya dilakukan pemberian nilai masing-masing parameter untuk melihat nilai keberhasilan dan nilai parameter seperti pada Tabel 5 berikut ini.

Tabel 5. Nilai keberhasilan dan nilai parameter

No.	Parameter	Nilai keberhasilan	Nilai Parameter
1	Produksi	19.201 ton / hari	5
2	Frekuensi Kunjungan Kapal	11 kapal / hari	3
3	Pelayanan Es	18.324 ton/hari	5
4	Pelayanan BBM	5.262 ton / hari	5
5	Pelayanan Air Bersih	6.616 ton/hari	1
6	Kantor administrasi	Tersedia berfungsi	5
7	Pemasaran	Nasional	3
8	Industri Pengolahan	Tidak tersedia	1
9	Fasilitas perbaikan alat tangkap	Tidak tersedia	1
10	Fasilitas perbaikan kapal	Tidak tersedia	1
11	Fasilitas suplai suku cadang	Tidak tersedia	1
12	Sarana pemasaran	Tersedia berfungsi	5
13	Mess	Tidak tersedia	1
14	Kantin	Tersedia berfungsi	5
15	Tempat ibadah	Tersedia berfungsi	5
16	Poliklinik	Tidak tersedia	1
17	Pos jaga	Tersedia tidak berfungsi	3

Berdasarkan pada Tabel 5, nilai keberhasilan yang merupakan nilai riil kemudian digunakan untuk penentuan nilai parameter. Selanjutnya, nilai parameter dan bobot parameter diperkalikan untuk mendapatkan nilai perolehan seperti pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil perhitungan nilai perolehan

No	Parameter	Bobot Parameter (A)	Nilai Parameter (B)	Nilai Perolehan (A x B)
1	Produksi	1,0	5	5
2	Frekuensi Kunjungan Kapal	1,0	3	3
3	Pelayanan Es	1,0	5	5
4	Pelayanan BBM	1,0	5	5
5	Pelayanan Air Bersih	1,0	1	1

6	Kantor administrasi	0,5	5	2,5
7	Pemasaran	0,6	3	1,8
8	Industri Pengolahan	0,6	1	0,6
9	Fasilitas perbaikan alat tangkap	0,5	1	0,5
10	Fasilitas perbaikan kapal	0,5	1	0,5
11	Fasilitas suplai suku cadang	0,4	1	0,4
12	Sarana pemasaran	0,4	5	2
13	Mess	0,3	1	0,3
14	Kantin	0,3	5	1,5
15	Tempat ibadah	0,3	5	1,5
16	Poliklinik	0,3	1	0,3
17	Pos jaga	0,3	3	0,9
	Total Bobot	10	Total Nilai Perolehan	31,8

Hasil yang didapatkan pada Tabel 6 bahwa nilai perolehan dari 17 parameter pengukuran kinerja operasional PPI Lappa adalah 31,8 sehingga didapatkan nilai kinerja PPI Lappa sebesar 63,6 % atau dikatakan bahwa PPI Lappa memiliki kinerja kategori baik. Kinerja baik disebabkan oleh produksi ikan yang tinggi, ketersediaan pelayanan es dan BBM, ketersediaan sarana pemasaran, kantin dan tempat ibadah.

Produksi merupakan hasil tangkapan ikan yang didaratkan di PPI sebagai sarana penunjang pelabuhan perikanan (Kahar, 2013), umumnya terdiri dari berbagai jenis ikan demersal dan pelagis, yang didominasi ikan cakalang, tuna, tongkol, kerapu, udang dan teripang dan jenis ikan lainnya. Hal ini sama dengan hasil tangkapan yang didaratkan di PPI Lappa terdiri dari berbagai jenis ikan demersal dan ikan pelagis. Lebih lanjut dijelaskan oleh Lubis (2012) bahwa hasil tangkapan yang didaratkan di satu pelabuhan perikanan akan menentukan tingkat operasional dari fasilitas yang ada karena produksi hasil tangkapan merupakan indikator tingkat fungsionalisasi suatu pelabuhan perikanan.

Selain itu, Ngamel *et al* (2013), menjelaskan bahwa apabila frekuensi jumlah kunjungan kapal di pelabuhan perikanan sedikit maka akan mempengaruhi produksi ikan yang didaratkan juga mengalami jumlah yang sedikit. Adapun, Ginting (2011), menyatakan bahwa ukuran kapal dan jenis alat tangkap yang digunakan memberikan pengaruh terhadap jumlah produksi hasil tangkapan. Hasil yang didapatkan sama juga dengan Widiastuti (2010), bahwa produksi ikan di PPS Nizam Zachman Jakarta melebihi batas di mana nilai keberhasilan produksi ikan yang didapatkan melewati batas indikator. Selanjutnya Muhibuddin (2020), menjelaskan bahwa lebihnya produksi perikanan di PPI Lappa disebabkan karena banyaknya kapal dari perairan WPP 713 yang mendaratkan hasil tangkapannya di PPI Paotere. Hal tersebut juga didapatkan di PPI Lappa, jumlah produksi

hasil tangkapan ikan termasuk jumlah yang tinggi pada tahun 2019 dengan hasil produksi ikan sebanyak 8.725.376 kg dan 8.207.027 kg tahun 2020.

Pencapaian jumlah produksi perikanan di PPI Lappa rata-rata yakni sebanyak 19.201 kg atau 19.201 ton/hari. Diketahui berdasarkan nilai yang ditetapkan, parameter produksi memiliki nilai keberhasilan mencapai ≥ 2 ton, sehingga yang didapatkan hasil nilai perolehan yakni mencapai angka 5 dengan persentase nilai keberhasilan yaitu 960.050%. produksi perikanan PPI Lappa melebihi standar indikator untuk pelabuhan perikanan tipe D pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/2012 Tentang Kepelabuhan Perikanan yaitu aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan maksimal rata-rata 2 ton/hari. Banyaknya produksi hasil tangkapan di PPI Lappa dikarenakan kapal berasal dari luar daerah atau antar pulau seperti Kalimantan, NTB, dan Sulawesi Tenggara yang mendaratkan hasil tangkapannya di PPI Lappa.

Keberadaan aktivitas armada penangkapan ikan di suatu pelabuhan tidak terlepas dari kegiatan perikanan yang berperan dalam hal produksi hasil tangkapan. Armada kapal di PPI Lappa digolongkan dengan beberapa kategori ukuran kapal yakni 1-30 GT dan armada ini digolongkan menjadi tiga kategori yaitu perahu tanpa motor (PTM), perahu motor tempel (PMT), dan kapal motor (KM). Selain itu, ukuran armada kapal yang mendominasi di PPI Lappa yaitu 10-20 GT dengan lebar kapal 2,5-3 meter dan panjang 13-14 meter. Sementara ukuran kapal tersebut dengan panjang dermaga saat ini yang hanya 166 meter. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Wibowo *et al* (2021), bahwa Kabupaten Sinjai memiliki kelemahan di bidang perikanan tangkap yang menonjol yaitu minimnya armada penangkapan yang berukuran >30 GT. Sedangkan, Jumlah kapal di Kabupaten Sinjai didominasi oleh kapal motor (<30 GT). Berdasarkan data tahun 2020 yang didapatkan dari Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai jumlah kapal motor mendominasi di PPI Lappa. Selain itu, Nugroho *et al* (2012), mengatakan bahwa keberadaan armada penangkapan ikan di suatu pelabuhan perikanan merupakan faktor yang sangat berperan dalam menentukan banyak sedikitnya jumlah produksi hasil tangkapan yang didaratkan dan aktivitas operasional di pelabuhan perikanan. Selanjutnya, Suryana *et al* (2013) yang menyatakan bahwa GT atau ukuran kapal berpengaruh terhadap hasil tangkapan. Semakin besar GT kapal semakin besar pula hasil tangkapan. Hal ini dikarenakan bentuk dan ukuran suatu kapal akan berpengaruh terhadap kekuatan kapal tersebut di atas laut.

Pencapaian parameter frekuensi kunjungan kapal di PPI Lappa yaitu rata-rata 11 unit kapal/hari. Sehingga parameter frekuensi kunjungan kapal di PPI Lappa pada mendapatkan persentase nilai keberhasilan yaitu 73,3% dan nilai perolehan yaitu angka 3. Jumlah tersebut

rendah dibanding dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/2012 Tentang Kepelabuhan Perikanan BAB II Bagian Keempat Klasifikasi Pelabuhan Perikanan Pasal 9 tentang pelabuhan perikanan tipe D bagian a nomor 4 (empat) yang berbunyi “Mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 15 unit atau jumlah keseluruhannya sekurang-kurangnya 75 GT”.

Es merupakan kebutuhan yang penting dalam aktivitas suatu pelabuhan. Menurut Muhibuddin (2020), menjelaskan bahwa es adalah salah satu kebutuhan logistik yang dibutuhkan nelayan agar dapat mempertahankan mutu dan kualitas hasil tangkapannya. PPI Paotere memiliki pabrik es di dalam wilayah pelabuhan. Hal tersebut sangat membantu pihak yang melakukan kegiatan penangkapan di pelabuhan. Berbeda dengan PPI Lappa tidak memiliki pabrik yang dapat menghasilkan es sehingga untuk memenuhi kebutuhan es bagi pengguna PPI Lappa dapat diperoleh dan dibeli dari pabrik es yang berasal dari luar pelabuhan. Selain itu, untuk membeli es harus melakukan pemesanan terlebih dahulu melalui pedagang es yang ada di area pelabuhan dan selanjutnya kepada pihak pengelola pabrik. Studi yang sama juga dilakukan oleh Rizkiana *et al* (2018), bahwa untuk pembelian es di PPP Kuala Tungkal harus melakukan pemesanan terlebih dahulu kepada pihak pengelola pabrik sebelum melakukan operasi penangkapan di laut.

Pencapaian jumlah kebutuhan logistik es rata rata yaitu sebesar 18.324 ton/hari dengan nilai perolehan yang didapatkan yaitu 5 dan nilai persentase keberhasilan yaitu 458,107%. Jumlah tersebut cukup tinggi dibanding dengan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap No.432/DPT3/OT.220.D3/I/2008 standar indikator suplai es untuk pelabuhan perikanan tipe D yaitu ≥ 4 ton. Hal tersebut terjadi karena tingginya kegiatan operasi penangkapan ikan dan pemasaran hasil tangkapan di PPI Lappa.

Bahan bakar minyak merupakan kebutuhan para nelayan untuk menunjang atau mempermudah dalam kegiatan pelabuhan perikanan. Pelayanan jumlah kebutuhan BBM di PPI Lappa dinilai sudah memenuhi kebutuhan para nelayan karena suplai BBM yang selalu tersedia. Koperasi Unit Desa Lappa bekerjasama dengan pihak PPI Lappa dalam menangani kebutuhan suplai bahan bakar minyak yang dibutuhkan para nelayan. Namun terdapat beberapa nelayan kapal yang melakukan pengisian BBM diluar dari pelayanan PPI Lappa. Penyediaan kebutuhan BBM di PPI Lappa disuplai oleh PT Pertamina dengan alokasi sampai 23 tangki per bulan. PPI Lappa memiliki 1 tangki dengan kapasitas 20.000 liter dan harga solar saat ini Rp. 5.150 per liter. Sama halnya dengan hasil yang diperoleh Muhibuddin (2020), kebutuhan jumlah BBM yang diperlukan dinilai sudah emenuhi kebutuhan nelayan karena persediaan selalu tersedia di SPDN PPI Paotere. Berbeda dengan

Rizkiana *et al.* (2018), mengatakan bahwa jika jumlah BBM di Pelabuhan belum mampu untuk memenuhi semua kebutuhan nelayan, sehingga dilakukan pengaturan untuk pembatasan jumlah BBM untuk masing-masing nelayan agar semua nelayan bisa mendapatkan BBM.

Jumlah kebutuhan perbekalan solar nelayan yaitu rata-rata 5.262 ton/hari. Persentase keberhasilan untuk parameter pelayanan bahan bakar minyak BBM yaitu 175,40% dan nilai perolehan yang didapatkan dari parameter pelayanan BBM yakni angka 5. Pencapaian tersebut merupakan jumlah yang tinggi dibanding dengan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap No.432/DPT/OT.220.D3/I/2008 standar indikator suplai BBM untuk pelabuhan perikanan tipe D yaitu 3 ton/hari. Sehingga parameter pelayanan bahan bakar minyak (BBM) mendapatkan nilai keberhasilan ≥ 3 ton. Pencapaian tersebut menggambarkan bahwa penyediaan bahan bakar minyak (solar) di PPI Lappa terpenuhi.

Air bersih merupakan kebutuhan pokok dalam kegiatan operasional pelabuhan. Sedangkan persediaan air bersih di PPI Lappa saat ini belum cukup dikarenakan tangki air bersih sudah lama rusak. Sebahagian besar kebutuhan air bersih para nelayan untuk perbekalan kapal berasal dari rumah warga yang menjual air bersihnya dengan menggunakan gerobak jerigen. Sama halnya dengan hasil penelitian Muhibuddin (2020), menjelaskan bahwa nelayan kapal besar yang akan melaut membeli air bersih diluar kawasan PPI Paotere untuk perbekalan kapal dengan menggunakan gerobak jerigen. Selain itu, untuk kebutuhan fasilitas PPI Lappa yang digunakan untuk mandi, WC, kantor dan fasilitas penunjang lainnya berasal dari PDAM Kabupaten Sinjai sebanyak 5.000 liter per hari. kebutuhan air bersih yang digunakan untuk membersihkan hasil tangkapan, lantai gedung TPI, dan basket hasil tangkapan berasal dari sumur bor dengan kedalaman ± 13 meter atau hanya menggunakan air sungai. Berbeda halnya dengan hasil penelitian Rizkiana *et al.* (2018), yang mengatakan bahwa kondisi sumber air di Pelabuhan sulit ditemukan untuk mendapatkan air bersih terlebih dahulu harus membuat sumur bor dengan kedalaman kira-kira $\pm 130-200$ meter.

Parameter pelayanan air bersih memiliki persentase nilai keberhasilan sebesar 22.05% .sehingga nilai perolehan yang didapatkan hanya mencapai angka 1. Hal tersebut terjadi karena penggunaan air bersih rata-rata hanya 6.616 ton/hari. Jumlah kebutuhan air bersih tersebut termasuk rendah dibanding standar idikator untuk pelabuhan perikanan tipe D pada Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap No. 432/DPT3/OT.220.D3/I/2008 yaitu 30 ton/hari. maka parameter pelayanan air bersih memiliki nilai keberhasilan ≤ 15 ton.

Kegiatan operasional pelabuhan perikanan akan berjalan lancar jika fasilitas yang dimiliki dapat membantu dalam segala aktivitas seperti yang tertera di Peraturan Menteri

Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/2012 Tentang Kepelabuhan Perikanan BAB II Bagian Ketiga pasal 4 poin ke 3f yang berbunyi “fasilitas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat terdiri atas perkantoran seperti kantor administrasi pelabuhan, pos pelayanan terpadu, dan perbankan”. Berdasarkan hasil penelitian, untuk parameter Kantor administrasi di PPI Lappa diperoleh angka 5 yang artinya parameter tersebut tersedia berfungsi. Selain itu, Laga (2005) menyatakan bahwa keberadaan fasilitas kantor administrasi sangat penting karena di tempat itulah pelayanan dan pengelolaan aktivitas di PPI diatur dan kantor administrasi merupakan tempat data perikanan dikumpulkan.

Sistem pemasaran yang digunakan di PPI Lappa ada beberapa sistem, yakni dimana pengusaha pengumpul membeli langsung dari nelayan dan mengangkutnya ke berbagai pasar antar daerah, adapun pengumpul membeli langsung dari nelayan dan langsung kekonsumen, juga sistem pedagang pengecer membeli langsung dari nelayan dan membawanya ke pasar lokal maupun keluar daerah dan kemudian ke konsumen. Kegiatan pemasaran ikan mengikuti waktu pendaratan hasil tangkapan yaitu dilakukan dua kali sehari, pada pagi hari mulai pukul 05.00-11.00 WITA dan pada sore hari mulai pukul 15.00-19.00 WITA, aktivitas pemasaran ikan di PPI Lappa setiap hari ramai dikunjungi pada pagi dan sore hari, namun tidak sedikit pula para nelayan kapal besar mendaratkan hasil tangkapannya pada siang hari. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengelola PPI Lappa, hasil tangkapan yang didaratkan umumnya akan didistribusikan diluar kota seperti kota Makassar, Pare-pare, Takalar, Soppeng, Pinrang, Sidrap, Polmas, mamuju dan Bone. Selain itu hasil tangkapan juga didistribusikan di luar daerah Sulawesi seperti Provinsi Kalimantan. Sesuai dengan hasil yang juga diperoleh oleh Ikramullah (2018) bahwa untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal dilakukan pemasaran antar kabupaten, sedangkan untuk kebutuhan luar daerah dilakukan pemasaran antar provinsi.

Pencapaian parameter pemasaran hanya didapatkan nilai keberhasilan yakni pemasaran nasional dengan nilai perolehan yaitu angka 3. Berdasarkan hasil penelitian jumlah produksi perikanan di PPI Lappa masuk kategori nilai tinggi namun sejauh ini pemasaran sebagian besar didistribusikan untuk lokal dan antar provinsi. Hal ini sesuai dengan salah satu fungsi pelabuhan perikanan yang terdapat di PERMEN KP RI Nomor PER.08/MEN/2012.

PPI Lappa setiap harinya selalu padat akan aktivitas dalam hal sektor perikanan dan kelautan. Saking dikenalnya banyak yang menetapkan Kabupaten Sinjai sebagai kota ikan. Wibowo *et al.* (2021), menyatakan bahwa sektor perikanan tangkap Kabupaten Sinjai

merupakan sektor yang dapat menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi yang didukung oleh potensi perikanan yang sangat potensial di Kabupaten Sinjai di mana memiliki produksi ikan yang beragam dimanfaatkan nelayan di pesisir Teluk Bone. Selanjutnya, menurut Dirjen Perikanan 1994b juga mengatakan bahwa keberhasilan suatu kegiatan operasional pelabuhan perikanan tergantung pada kelancaran aktivitasnya mulai dari proses pendaratan hasil tangkapan, pelelangan, pengolahan hingga pemasaran hasil tangkapan. Namun kendati dengan hal tersebut berbanding balik dengan peningkatan produksi yang belum memadai dalam hal pengembangan industri pengolahan yang berada di PPI Lappa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/2012 Tentang Kepelabuhan Perikanan BAB II Bagian Ketiga pasal 4 poin ke 3 yang berbunyi “fasilitas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat terdiri atas tempat penanganan dan pengolahan hasil perikanan seperti transit shed dan laboratorium pembinaan mutu”. Berdasarkan hasil yang didapatkan untuk parameter industri pengolahan mendapatkan nilai keberhasilan yakni tidak tersedia dengan nilai perolehan angka 1.

Setiap pelabuhan perikanan memiliki fasilitas yang dapat mempermudah kegiatan operasional namun tidak semua pelabuhan memiliki fasilitas tersebut. Seperti halnya di PPI Lappa belum memiliki fasilitas yang dapat menopang untuk kelancaran operasional pelabuhan saat ini seperti fasilitas perbaikan alat tangkap, perbaikan kapal, dan suplai suku cadang. Sama halnya dengan yang dikatakan Kurnia *et al.* (2019) bahwa peranan pelabuhan sebagai pusat aktivitas dan sentra produksi ikan hasil tangkapan harus terpenuhi dengan fasilitas dan sarana pelabuhan yang memadai. Selain itu Lubis dan Mardiana (2011) menyatakan bahwa peran fasilitas tentunya semakin penting dalam mendukung kelancaran aktivitas Pangkalan Pendaratan Ikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/2012 Tentang Kepelabuhan Perikanan BAB II Bagian Ketiga pasal 4 poin ke 3 yang berbunyi “fasilitas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat terdiri atas tempat pemeliharaan kapal, dan alat penangkapan ikan seperti *dock/slipway*, bengkel dan tempat perbaikan jaring”. Pencapaian setiap parameter yakni parameter fasilitas perbaikan alat tangkap, perbaikan kapal dan suplai suku cadang dari setiap parameter mendapatkan nilai keberhasilan tidak tersedia dan masing-masing parameter mendapatkan nilai perolehan yaitu angka 1.

Keberadaan fasilitas pemasaran sebagai sarana untuk memasarkan hasil tangkapan yakni Tempat Pelelangan Ikan di pelabuhan perikanan khususnya di PPI Lappa. Maka sama halnya dengan Ngamel *et al.* (2013) yang mengatakan bahwa produksi ikan yang merupakan hasil kegiatan usaha penangkapan sebagai barang produksi akan sampai ke konsumen sebagai bahan pangan dan sangat dipengaruhi oleh keadaan sarana dan prasarana pelabuhan. Oleh karena itu, tempat pelelangan ikan termasuk sarana yang sangat penting diadakan. Selain itu, sesuai dengan Rizkiana *et al.* (2018) katakan bahwa nelayan yang melakukan pendaratan ikan hasil tangkapan di pelabuhan selalu menggunakan fasilitas gedung TPI untuk melakukan penimbangan, pengepakan ikan hasil tangkapan guna di distribusikan ke daerah-daerah konsumen.

Pencapaian parameter sarana pemasaran mendapatkan nilai keberhasilan yakni tersedia berfungsi dan nilai yang diperoleh yakni angka 5. Berdasarkan menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/2012 Tentang Kepelabuhan Perikanan BAB II Bagian Ketiga pasal 4 poin ke 3a yang berbunyi “fasilitas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat terdiri atas Tempat Pemasaran Ikan (TPI).

Keberadaan fasilitas-fasilitas penunjang merupakan hal yang tidak terlepas dengan kegiatan operasional suatu pelabuhan perikanan terkhususnya di PPI Lappa. Mess, Kantin, Tempat ibadah, Poliklinik, dan Pos Jaga merupakan fasilitas yang berada di PPI Lappa dan dijadikan parameter pengukuran kinerja pelabuhan perikanan. Menurut Najah *et al* (2012) menyatakan bahwa kegiatan operasional akan berjalan dengan sempurna, bila di tunjang oleh keberadaan fasilitas dan pelayanan yang baik dari pihak pengelola pelabuhan.

Berdasarkan PE.08/MEN/2012 Tentang Kepelabuhan Perikanan BAB II Bagian Ketiga pasal 4 huruf b, d,e dan f yang berbunyi “fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat terdiri atas mess operator, tempat, peribadatan, pertokoan, dan pos jaga”. Pencapaian untuk parameter kantin, tempat ibadah mendapatkan nilai keberhasilan yakni tersedia berfungsi dengan angka yang diperoleh 5, untuk parameter pos jaga mendapatkan nilai keberhasilan tersedia tidak berfungsi dan mendapatkan nilai perolehan angka 3. Sedangkan parameter poliklinik mendapatkan nilai keberhasilan yakni tidak tersedia dan mendapatkan nilai perolehan angka 1.

Sementara, acuan dari parameter poliklinik berasal dari literatur terpercaya yakni buku yang berjudul “Pelabuhan Perikanan” yang di tulis oleh Dr. Ir. Ernani Lubis, DEA dalam bukunya yang mengatakan bahwa pelabuhan perikanan terdiri dari fasilitas kesejahteraan seperti poliklinik.

Simpulan

Kinerja operasional Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Lappa Kabupaten Sinjai tergolong kategori baik dengan penilaian perolehan kinerja pelabuhan perikanan $\geq 50\%$ - $< 80\%$, yang didukung fasilitas yang tersedia dan berfungsi baik, serta memenuhi kapasitas sebagai pelabuhan perikanan tipe D.

Daftar Pustaka

- Direktorat Bina Prasarana Perikanan. 1994. Petunjuk Teknis Pelabuhan Perikanan. Direktorat Jenderal Perikanan. Departemen Pertanian Jakarta.
- Ginting, R. F. N. 2011. Kondisi dan Potensi Pengembangan Kepelabuhan Perikanan di Kabupaten Subang Skripsi. Bogor. Mayor Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap, Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Bogor
- Ikramullah, A. M. 2018. Model Implementasi Kebijakan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Untia Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan [Tesis. Makassar: Program Magister Administrasi Pembangunan. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Hasanuddin.
- Jaya, I. 2019. Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Untia, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Makassar: Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Universitas Hasanuddin.
- Kahar. 2013. Studi Kesesuaian Fasilitas dengan Jumlah Hasil Tangkapan dan Kemungkinan Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Lappa Kabupaten Sinjai. Skripsi Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin.
- Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap No. 432/DPT3/OT.220.D3/I/2008. (2008). Pedoman Evaluasi Kinerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan. Jakarta.
- Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 2012. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NOMOR PER. 08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan.
- Kurnia., Mustaruddin., Lubis, E. 2019. Proyeksi Produksi Ikan Hasil Tangkapan Di Pelabuhan Perikanan Samudera Kutaraja Provinsi Aceh. Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan 10(1) :69-77.
- Laga, A. 2005. Analisis Sistem Pengelolaan Pelabuhan Perikanan (Studi Kasus: Pangkalan Pendaratan Ikan Paotere Makassar). Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Lubis, 2012. Pelabuhan Perikanan. Bogor: PT Penerbit IPB Press.
- Lubis, E dan Mardiana, N. 2011. Peranan Fasilitas PPI Terhadap Kelancaran Aktivitas Pendaratan Ikan di Cituis Tangerang. Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan 1(2): 1-10.
- Muhibuddin, F. T. A. 2020. Kinerja Operasional Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Paotere Kota Makassar. Skripsi Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin.
- Najah RA., Lubis E., Muningsar R. 2012. Keberadaan Fasilitas Menurut Aktivitas Di Pelabuhan Perikanan Pantai Lampulo, Banda Aceh. Marine Fisheries 3(1):55-70.

- Ngamel YA., Lubis E., Pane AB., Solihin I. 2013. Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual. *Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan* 4(2):155-172.
- Nugroho, T., Solihin, I., Fathurohim. 2021. Faktor-faktor Penentu Kinerja Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Dadap Di Kabupaten Indramayu. *Marine Fisheries* 3(1) :91-101.
- Rizkiana, L., Solihin, I., Pane, AB. 2018. Tingkat Kebutuhan Nelayan Terhadap Pelayanan Operasional PPP Kuala Tungkal Provinsi Jambi. *Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan* 9(2): 193-203.
- Sulfitra dan A. Ariyanto. 2018. Analisis Evaluasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Lampulo dalam Meningkatkan Kesejahteraan Hidup dan Pengurangan Angka Pengangguran. *Jurnal Ilmiah Manajemen Muhammadiyah Aceh (JIMMA)* 8(1): 34 - 48.
- Suryana S.A., Raharjo, I.P., Sukandar, S.S. 2013. Pengaruh Panjang Jaring, Ukuran Kapal, Pk Mesin dan Jumlah ABK terhadap Produksi Ikan pada Alat Tangkap Purse Seine di Perairan Prigi Kabupaten Trenggalek-Jawa Timur. *Jurnal Mahasiswa Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan* 1(1):36-43.
- Wibowo. A.B, Aiman. A.M.A, Setyawan. A.H. 2021. Strategi Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Kabupaten Sinjai. *Jurnal Penelitian Kelautan* 10(4):481-492.
- Widiastuti, A. 2010. *Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta*. Bogor: Mayor Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap Departemen Pemanfaatan Sumber daya Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor.